

PEMODELAN PEMERIKSAAN REALISASI ANGGARAN UNTUK BENDAHARA DI JEMAAT GMIM TUMPENGAN WILAYAH SEA

Rudy Poeng, Charles Punuhsingon, Benny L. Maluegha.

Jurusan Teknik Mesin Universitas Sam Ratulangi Manado

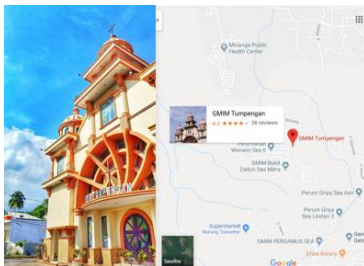
Abstrak

Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tumpengan wilayah Sea setiap tahun melaksanakan 2 (dua) kali pengawasan keuangan, termasuk untuk pemeriksaan realisasi anggaran pada bendahara jemaat. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) sebelumnya telah dilaksanakan untuk pemodelan pemeriksaan sentralisasi kolom dan komisi jemaat di GMIM Tumpengan. Dan untuk PKM saat ini dilanjutkan dengan melakukan pemodelan pemeriksaan realisasi anggaran bendahara jemaat. Dengan penerapan ini, maka BPPJ GMIM Tumpengan mampu melaksanakan pemeriksaan bendahara jemaat dengan optimal dan mengetahui capaian realisasi anggaran di jemaat GMIM Tumpengan.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Realisasi Keuangan, Bendahara

Pendahuluan

Jemaat Tumpengan, merupakan salah satu jemaat yang kristiani protestan yang berdomisili di daerah minahasa yaitu wilayah Sea, desa Tumpengan kecamatan Pineleng. Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tumpengan terdiri 24 kolom, 5 komisi pelayanan BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak), 7 komisi Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) dan juga Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ).



Gambar 1.1 Gedung Gereja GMIM Tumpengan

Setiap akhir tahun majelis jemaat GMIM Tumpengan melakukan rapat untuk merumuskan dan menetapkan anggaran belanja. Dalam rapat tersebut akan diperoleh pos-pos anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun kedepan, baik penerimaannya dan pengeluarannya. Hasil pos-pos anggaran dari hasil persetujuan sidang majelis ini akan diserahkan kepada bendahara jemaat untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kemudian dua kali setahun BPPJ akan melakukan pemeriksaan realisasi anggaran tersebut, sehingga akan didapatkan pencapaian dari pos-pos anggaran yang telah ditetapkan untuk penerimaan dan untuk pengeluaran.

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) sebelumnya telah dilaksanakan untuk pemodelan pemeriksaan sentralisasi kolom dan komisi jemaat di GMIM Tumpengan. Dan untuk PKM saat ini dilanjutkan dengan melakukan pemodelan pemeriksaan realisasi anggaran bendahara jemaat.

Dengan penerapan ini, maka BPPJ GMIM Tumpengan mampu melaksanakan pemeriksaan bendahara jemaat dengan optimal dan mengetahui capaian realisasi anggaran di jemaat GMIM Tumpengan.

Dalam pelaksanaan pos-pos anggaran, bendahara jemaat GMIM Tumpengan mendapatkan berbagai kendala dalam realisasi anggaran tersebut diantaranya masalah pembukuan, masalah penerimaan keuangan, masalah pengeleuran dan berbagai masalah lainnya. Dimana pemasalahannya dijumpai ketika bendahara jemaat membuat pencapaian anggarannya mengalami kesulitan dalam kalkulasi/perhitungan keuangan, karena masih membuatnya secara manual. Selain itu memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaan oleh BPPJ. Jadi permasalahan dalam program kemitraan masyarakat ini, adalah bagaimana pemeriksaan realisasi anggaran pada bendahara di jemaat GMIM Tumpengan dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, mudah dan efektif.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pemodelan

Pemodelan secara umum, dimengerti sebagai proses merepresentasikan objek nyata atau realita sebagai seperangkat persamaan matematika, grafis ataupun bagan agar mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Lebih khusus lagi, istilah ini sering digunakan untuk proses menggambarkan konsep yang mewakili obyek - obyek dalam pengembangan sistem informasi.

Pemodelan dalam pengembangan sistem informasi, berevolusi selaras perkembangan teknologi dan metodologi pengembangannya. Kesamaan pandang diperlukan dalam pemodelan, yang akhirnya menuntut adanya keseragaman atau standar. Teknologi obyek, membutuhkan pemodelan yang relevan, menciptakan standar pemodelan untuk pengembangan sistem.

Pemodelan sistem ini berkaitan dengan bagaimana sistem yang diwujudkan dengan menggunakan teknologi. Pemodelan sistem sebagian besar merupakan kegiatan teknologi yang mencoba untuk menerjemahkan model aplikasi ke dalam bangunan sistem operasional. Pemodelan sistem harus berurusan dengan rincian spesifikasi yang menjelaskan bagaimana bagian-bagian sitem akan diwujudkan. Misalnya, model harus berurusan dengan konstruksi khusus pemrograman, layanan middleware, model data, dan sebagainya. Model sistem, menghasilkan pandangan internal solusi, menunjukkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda berinteraksi dalam rangka mendukung eksternal, tampilan aplikasi. Pemodelan sistem adalah di mana persyaratan non-fungsional (misalnya, platform, kinerja, throughput, skalabilitas, kemampuan pemeliharaan) dibahas. Model sistem dinyatakan dalam istilah-istilah teknis dan untuk penggunaan internal teknologi yang bekerja di dalamnya. (Yuwana, Y. 2002)

2.2 Jemaat GMIM Tumpengan

Jemaat Tumpengan, merupakan salah satu jemaat yang kristiani protetan yang berdomisili di daerah minahasa yaitu wilayah SEA, desa Tumpengan kecamatan Pineleng. Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tumpengan terdiri 24 kolom, 5 komisi pelayanan BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja dan Anak), 7 komisi Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) dan juga Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ).

BPPJ GMIM Tumpengan, setiap tahun melakukan dua kali pemeriksaan adminitrasi keuangan (setiap 6 bulan) bagi pemegang keuangan dari tingkat kolom sampai komisi jemaat dan kegiatan panitia-panitia lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan memerlukan waktu yang lama sampai tiga bulan, hal ini disebabkan karena model sentralisasi yang bervariasi dan tidak ada data pembanding dalam melaksanakan pemeriksaan.

2.3 Pengertian Pengawasan Pebendaharaan

Yang dimaksud dengan Pengawasan Perbendaharaan dalam peraturan ini ialah suatu fungsi mengawasi, memeiksa, membina dan mengembalikan pengelola perbendaharaan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara adil, jujur dan independen. Pengawasan perbendaharaan disini lebih ditekankan pada pembinaan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan dan mendorong usaha peningkatan kualitas perbendaharaan dalam pelayanan secara menyeluruh.

Tugas pengawasan perbendaharaan dilakukan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan di semua aras untuk membina, membimbing, memberi petunjuk dan memberi rekomendasi guna

tercapainya pengelolaan perbendaharaan yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan untuk mencegah terjadinya pengelolaan perbendaharaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan untuk meneliti keabsahan pengelolaan perbendaharaan. (BPPS GMIM. 2005)

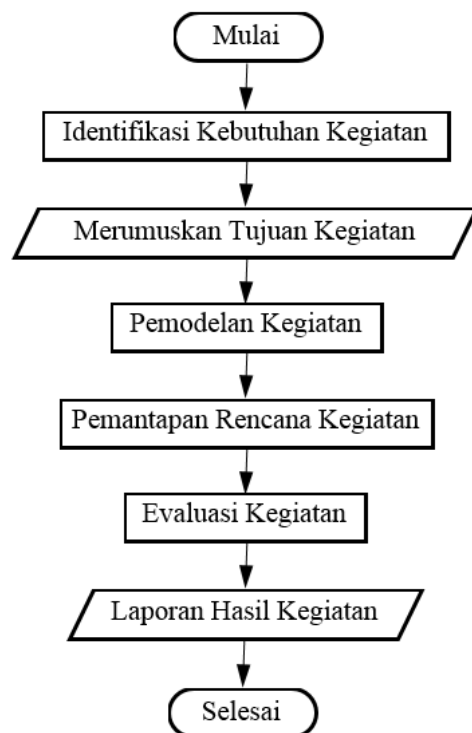
Pelaksanaan

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan PKM ini dilakukan di Gereja GMIM Tumpengan. Dan waktu pelaksanaan 06 Juli sampai dengan 14 Juli 2019.

3.2 Prosedur Pelaksanaan

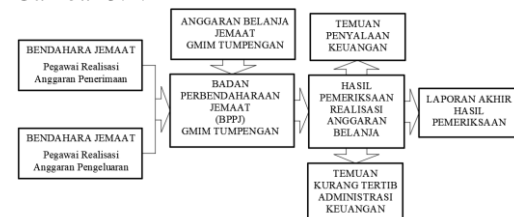
Prosedur pelaksanaan PKM ini berupa pelaksanaan pemeriksaan dari BPPJ GMIM Tumpengan terhadap Bendahara Jemaat (lihat Gambar 3.1).



Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan

3.3 Program Kerja Pengawasan Perbendaharaan

Model pemeriksaan bendahara jemaat GMIM Tumpengan, melalui pegawai realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Model pemeriksaan

1. Realisasi Anggaran Penerimaan



2. Realisasi Anggaran Pengeluaran

3. Laporan Ke Sidang Majelis



Penutup

5.1 Kesimpulan

Hasil Program Kemitraan Masyarakat yang dilakukan pemeriksaan realisasi anggaran belanja di Jemaat GMIM Tumpengan wilayah SEA, adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan realisasi anggaran penerimaan kas jemaat GMIM Tumpengan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2019, capaiannya 42,81 %.
2. Pemeriksaan realisasi anggaran pengeluaran kas jemaat GMIM Tumpengan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2019, capaiannya 39,21 %
3. Dengan adanya pemodelan pemeriksaan anggaran realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk bendahara di jemaat GMIM tumpengan wilayah SEA, mempermudah dan mempercepat BPPJ dalam melakukan pemeriksaan.

4. Dengan pelaksanaan PKM dengan model yang diterapkan, maka hasilnya pemeriksaan dapat dilakukannya dalam waktu satu bulan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan BPPJ dapat dikembangkan dengan pemeriksaan inventaris aset jemaat.
2. Dapat menggunakan sistem online sehingga lebih mempermudah proses pemeriksaan dan pergerakan keuangan di jemaat lebih akuntabel.

Daftar Pustaka

- Rochim, T. 2002, Sistem Informasi Produksi, Mechanical & Production Engineering (MPE), Mesin FTI-ITB.
- Simarmata, J. 2008, Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, Yogyakarta, penerbit Andi.
- Suhendar, H. 2002, Visual Modeling Menggunakan UML dan Rational Rose, Informatika Bandung.
- Yuwana, Y. 2002, Teknik Pemograman Berorientasi Obyek, Laboratorium Teknik Produksi Mesin Institut Teknologi Bandung.
- BPPS GMIM. 2005, Pedoman Pemeriksaan dan Norma Pemeriksaan BPPS SINODE GMIM